

# RELEVANSI STRATEGI PERTAHANAN LAUT BERDASARKAN DOKTRIN JALESVEVA JAYAMAHE TERHADAP GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

## THE RELEVANCE OF MARINE DEFENSE STRATEGY BASED ON JALESVEVA JAYAMAHE DOCTRINE ON GLOBALIZATION AND STRATEGIC ENVIRONMENT DEVELOPMENT

Andhika Wira Kusuma<sup>1</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2</sup>, Dohar Sianturi<sup>3</sup>

Strategi Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan  
dikavin@gmail.com

**Abstrak** – Seiring dengan berjalannya globalisasi dan kemajuan teknologi, perkembangan lingkungan strategis saat ini jelas memberikan ruang gerak yang semakin bebas bagi ancaman terhadap semua bidang kehidupan bernegara, termasuk dalam hal pertahanan negara di laut. TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai komponen utama pertahanan negara di laut perlu menerapkan strategi pertahanan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dimana proyeksi pembangunan kekuatan maritim perlu mendapat perhatian untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki posisi tawar strategis dalam pergaulan internasional. Dalam menyusun konsep strategi pertahanan militer, diperlukan sebuah doktrin sebagai acuan yang mendasarinya. Dalam penulisan ini, penulis mencoba menganalisa relevansi doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe dikaitkan dengan situasi yang ada saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus adalah globalisasi di bidang pertahanan, kemajuan teknologi dan strategi pertahanan, perkembangan lingkungan strategis serta tantangan ke depan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan pendekatan fenomenologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe sebagai dasar yang dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi pertahanan laut dinilai masih sangat relevan dalam menghadapi potensi ancaman yang muncul sebagai akibat dari globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Peningkatan kapasitas kekuatan pertahanan laut melalui kemandirian industri pertahanan, pembinaan sumber daya manusia serta penguasaan teknologi pertahanan menjadi kunci untuk terus beradaptasi dalam menghadapi globalisasi dan rangkaian perubahan lingkungan strategis.

**Kata Kunci:** Strategi, pertahanan, doktrin, Jalesveva Jayamahe, globalisasi

**Abstract** – Along with globalization and technological advances, the development of the current strategic environment clearly provides an increasingly free space for threats to all areas of life as a state, including in terms of defense at the sea. The Indonesia Navy as the main component of national defense at sea needs to implement a defense strategy that is able to adapt with the situation, where the projected maritime power development needs attention to make Indonesia a maritime country that has a strategic bargaining position in international relations. In drafting the concept of a military defense strategy, a doctrine is needed as an underlying reference. In this paper, the author tries to analyze the relevance of the Indonesia Navy doctrine Jalesveva Jayamahe in relation to the current situation. Matters that are in focus are globalization in the defense sector, advances in technology and defense strategy, developments in the strategic environment and challenges ahead. The method used is qualitative with a literature study design and a phenomenological approach. From the research

---

<sup>1</sup>Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup>Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

results, it can be concluded that the Indonesia Navy doctrine *Jalesveva Jayamahe* as a basis for guidance in the formulation of marine defense strategies is still considered very relevant in facing potential threats that arise as a result of globalization and the development of a strategic environment. Increasing the capacity of marine defense forces through the independence of the defense industry, fostering human resources and mastering defense technology are the keys to continuing to adapt in the face of globalization and a series of strategic environmental changes.

**Keywords:** Strategy, defense, doctrine, *Jalesveva Jayamahe*, globalization

## Pendahuluan

Sebuah proses dalam penentuan kebijakan di bidang pertahanan, terlebih yang berhubungan dengan upaya menciptakan stabilitas dan keamanan nasional, memerlukan analisis yang menyeluruh terhadap tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam menilai aspek-aspek tersebut, diperlukan pengkajian baik dari skala lokal, regional, maupun global. Hal tersebut diperlukan karena potensi ancaman yang mungkin terjadi dapat terkandung di dalam aspek-aspek tersebut. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi yang terjadi baik antara individu maupun antar negara didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membuat dimensi ancaman semakin kompleks dan beragam. Dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.” Sehingga sesuai amanat Undang-Undang Dasar, ketiga matra memiliki kewajiban dalam mengamankan keutuhan dan kedaulatan negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sesuai bidang tugasnya masing-masing. TNI Angkatan Laut selaku komponen utama pertahanan negara di laut memiliki lima tugas utama, yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan

wilayah pertahanan laut<sup>4</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, TNI AL memerlukan doktrin sebagai panduan, pegangan, dan pedoman untuk bertindak dalam mencapai tujuan sekaligus sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan matra laut.

Doktrin pertahanan negara pada hakikatnya merupakan suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan<sup>5</sup>. Doktrin tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar yang telah diyakini kebenarannya, yang digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa serta pengalaman masa lalu yang kemudian dijadikan pedoman dalam mengembangkan konsep pertahanan dan keamanan negara.

TNI AL memiliki doktrin Jalesveva Jayamahe yang merupakan penerus dari doktrin sebelumnya yakni Eka Sasana Jaya, yang resmi digantikan pada tanggal 11 Mei 2018. Jalesveva Jayamahe berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya “Justru di Lautan Kita Menang” atau

“Kejayaan Kita Ada di Laut”<sup>6</sup>. Sebagai bagian dari TNI, maka Doktrin TNI AL “Jalesveva Jayamahe” berkedudukan di bawah Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma”, dan berada pada strata strategis yang menjadi pedoman tertinggi dalam penyusunan doktrin TNI AL di bawahnya, yaitu doktrin-doktrin pada strata operasional dan taktis. Doktrin Tri Dharma Eka Karma merupakan doktrin penggunaan kekuatan TNI, sedangkan doktrin Jalesveva Jayamahe adalah doktrin pembinaan kekuatan TNI AL.

Dalam melaksanakan tugasnya, TNI AL memerlukan strategi sebagai penjabaran doktrin yang secara umum merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh para pimpinan TNI AL yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai dengan penyusunan suatu upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Clausewitz, strategi adalah penggunaan pertempuran untuk mencapai akhir perang, karena itu ia harus memberikan sasaran kepada seluruh tindakan militer, yang harus

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara, hlm. 13.

<sup>6</sup>Mabesal, "Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe", 18 September 2018, dalam [https://www.tnial.mil.id/doktrin\\_tni\\_angkatan\\_laut\\_jalesveva\\_jayamahe/](https://www.tnial.mil.id/doktrin_tni_angkatan_laut_jalesveva_jayamahe/), diakses tanggal 30 November 2020.

sesuai dengan obyek perang<sup>7</sup>. Penggunaan kekuatan militer sebagai sarana merupakan tujuan akhir dalam rangka mencapai tujuan politik negara. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dipergunakan suatu cara dan rencana yang tepat untuk mewujudkannya. Selain itu diperlukan sarana prasarana serta sumberdaya yang mencukupi dalam menjalankan cara dan rencana tersebut. Hal ini sesuai dengan model strategi militer Amerika Serikat *Ends, Ways, Means*<sup>8</sup>, dimana tujuan politik negara sebagai *ends*, cara dan rencana yang tepat sebagai *ways*, dan sarana prasana serta sumberdaya sebagai *means*. Undang Undang Dasar yang menjadi landasan dalam konsep pertahanan negara merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah begitu saja karena perumusannya berdasarkan pada nilai-nilai perjuangan bangsa, namun konsep pertahanan terkait dengan strategi dapat disesuaikan dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan tatanan di tingkat global.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk memahami fenomena yang menjadi objek penelitian untuk kemudian disajikan secara deskriptif. Pendekatan fenomenologi merupakan strategi dimana penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu<sup>9</sup>. Penelitian kualitatif sendiri terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan, menelaah, dan mereduksi seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber untuk dianalisis. Tahap kedua dilakukan dengan menyajikan data yang sudah direduksi dan dianalisis untuk dijadikan dasar bagi langkah selanjutnya untuk melakukan analisis atau membuat kesimpulan, sedangkan penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga dalam proses analisis<sup>10</sup>. Tipe penelitian kualitatif yang digunakan didalam tulisan ini berfokus pada menjelaskan suatu fenomena. Selain itu, tulisan ini juga

---

<sup>7</sup>Sun Tzu, et al., *The Complete Art of War*, (USA: Start Publishing LLC, 2012), hlm. 312.

<sup>8</sup>Arthur F. Lykke, "Defining Military Strategy", *Military Review*, Vol. 7 No.1, 1997, hlm. 183.

<sup>9</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 252.

menggunakan teknik analisis data bertipe eksplanatif dimana tulisan ini bermaksud untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyajikan serta menganalisis data tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat ditarik kesimpulan berupa gambaran jelas dan komprehensif mengapa suatu fenomena terjadi dan membuat suatu rekomendasi jika diperlukan. Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, jurnal, buku, dan halaman website. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap fenomena yang terjadi sehubungan dengan perkembangan situasi perkembangan lingkungan baik domestik, regional, maupun global. Selanjutnya untuk menganalisis relevansi strategi pertahanan negara di laut digunakan doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe.

## Hasil dan Pembahasan

### Globalisasi di Bidang Pertahanan

Ritzer mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses atau serangkaian proses lintas wilayah yang menyebabkan meningkatnya kecairan dan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi multi arah<sup>11</sup>. Diakui atau tidak sebenarnya globalisasi merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari dan membuat kabur batas geografis suatu negara. Menurut Ohmae, globalisasi menyebabkan negara-negara menjadi tanpa batas dan ada sebab serta akibat yang muncul dari pola interaksi tanpa sekat dan batasan geografis. Ditambah lagi dengan peranan media yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan suatu negara. Sedangkan Rosenberg berpendapat bahwa globalisasi terbangun dari elemen-elemen seperti ekonomi, sosial, politik, kultur, diplomasi, dan militer yang memiliki konteks dan keterhubungan yang unik<sup>12</sup>. Dalam pandangan ini bisa diartikan bahwa kondisi globalitas merupakan sebuah kesadaran global atau kebudayaan dunia yang menginginkan kebebasan, dimana konsep kebebasan yang terkandung dalam globalisasi bisa

---

<sup>11</sup>George Ritzer, *The Globalization of Nothing*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hlm. 96.

<sup>12</sup>Justin Rosenberg, *"Globalization Theory: A Post Mortem"*, *International Politics* Vol. 42, 2005, hlm. 57.

juga diartikan sebagai kebebasan dalam mendapatkan informasi.

Sejak awal abad 21, tercatat adanya peningkatan fenomena globalisasi pada industri pertahanan yang nampak semakin menguat sejak tahun 1980an. Hal tersebut ditandai dengan adanya kecenderungan yang cukup signifikan dalam intensitas kerjasama antar negara dalam pembangunan industri pertahanan mereka<sup>13</sup>. Saat itu, banyak negara maju lebih memilih untuk bekerjasama dengan negara lain dalam membangun industri pertahanannya dikarenakan adanya pengurangan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, dimana pengurangan anggaran tersebut terkait dengan tren kebijakan pengetatan anggaran, maupun biaya penelitian dan pengembangan (litbang) serta intensitas persaingan pada industri pertahanan<sup>14</sup>. Globalisasi industri pertahanan disebut sebagai salah satu fenomena meningkatnya kerjasama dan kolaborasi dalam produksi persenjataan, dikarenakan hal tersebut membawa perubahan dinamika pengadaan yang sifatnya independen menjadi

interdependensi<sup>15</sup>. Hal tersebut menjadi kontradiktif karena secara umum industri pertahanan memiliki sifat tertutup dan mengandung kerahasiaan strategis negara.

Pada masa sekarang, industri pertahanan memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Disamping fungsi utamanya yaitu menunjang sistem keamanan nasional seperti pengawasan wilayah udara maupun pemantauan jalur pelayaran suatu negara, industri pertahanan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Benoit, pengeluaran anggaran pertahanan yang besar dapat memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun sebaliknya, anggaran negara yang kecil akan memperlambat pertumbuhan ekonomi<sup>16</sup>. Hal tersebut dapat dipahami mengingat jika industri pertahanan semakin maju, maka secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan baru, disamping mendorong pertumbuhan industri lain yang memiliki keterkaitan, selain itu kemajuan industri pertahanan juga dapat mendorong

---

<sup>13</sup>Jonathan D. Caverley, "United States Hegemony and the New Economics of Defense", *Journal of Security Studies*, Vol. 16, 2007, hlm. 60.

<sup>14</sup>Richard A. Bitzinger, *The Modern Defence Industry: Political, Economic, and Technological Issues*, (California: ABC CLIO, 2009), hlm. 6.

<sup>15</sup>Mary Kaldor & Ulrich Albrecht, *The End of Military Fordism: Restructuring the Global Military Sector*, (London: United Nations University, 1998), hlm. 10.

<sup>16</sup>Emile Benoit, *Economic Development and Cultural Change*, (Lexington: Lexington Books., 1978), hlm. 271.

percepatan kemajuan teknologi dan menekan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan impor alutista dari negara lain.

### **Kemajuan Teknologi dan Strategi Pertahanan**

Dalam bidang pertahanan, teknologi persenjataan dan strategi pertahanan telah berkembang sangat pesat pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan liberalisme dan Uni Soviet dengan paham komunisme. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, sekalipun dunia sudah tidak berada dalam rivalitas antara dua negara *superpower* tersebut, perkembangan dari teknologi persenjataan dan strategi pertahanan tetap dianggap penting dalam kebijakan pertahanan sebuah negara. Dalam hal persenjataan, kemajuan teknologi dan industri pertahanan semakin berkembang pasca Perang Dingin terkait dengan semakin kompetitifnya pasar yang membuat produsen di bidang pertahanan harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan konsumen bagi produk yang dihasilkan. Dari sisi strategi pertahanan, muncul perubahan besar

dalam ruang lingkup peperangan sebagai dampak penerapan dari penemuan teknologi baru yang dikombinasikan dengan perubahan secara mendasar dalam doktrin, operasional dan konsep organisasi militer, yang secara mendasar terkait dengan karakter dan cara melakukan operasi militer. Perubahan tersebut dikenal sebagai *Revolution in Military Affairs (RMA)*<sup>17</sup>. Didasari oleh hal tersebut, negara-negara besar berupaya untuk melakukan inovasi terhadap produk industri pertahanan mereka dengan mengedepankan aplikasi teknologi terbaru dan mengembangkan konsep dan doktrin pertahanan guna menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan global. Dewasa ini, kita berada dalam sebuah era teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber informasi yang amat luas bagi siapa saja. Dunia saat ini telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi dan kemudian melahirkan masyarakat informasi, dimana secara sederhana, banyak orang yang sudah memahami dan memiliki akses terhadap informasi yang dahulunya tidak dimiliki. Informasi merupakan salah satu di antara tiga

---

<sup>17</sup>Eleanor Sloan, *Military Transformation and Modern Warfare: A Reference Handbook*,

(Westport: Praeger Security International, 2008), hlm. 3.

sumber daya dasar selain potensi material dan energi<sup>18</sup>. Oleh karena itu, seperti halnya materi dan energi, informasi dianggap tidak memiliki kegunaan praktis bila tidak dioperasikan, informasi memang diperoleh melalui kegiatan komunikasi tetapi yang sesungguhnya yang menentukan nilai komunikasi adalah informasi yang dibawanya<sup>19</sup>. Dalam era perkembangan teknologi saat ini, teknologi pertahanan dengan kemampuan siluman dan persenjataan nirawak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) seperti *drone* merupakan produk-produk yang menjadi andalan dalam industri pertahanan di negara-negara maju. Isu keamanan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan teknologi dan industri pertahanan menjadi subyek dari kontrol politik yang berpengaruh terhadap hubungan dengan pihak asing serta ekspor dan transfer teknologi<sup>20</sup>. Secara lebih lanjut, perubahan teknologi yang

drastis dan cepat, yang muncul pada era Revolusi Industri 4.0, memaksa militer beradaptasi lebih cepat dan berevolusi untuk melakukan perubahan besar. Hal ini membuat kondisi yang berhadapan dengan dinamika lingkungan strategis dan perubahan geopolitik<sup>21</sup>. Kemajuan teknologi dan strategi pertahanan yang demikian pesat menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam memaknai arti pertahanan dan keamanan nasional pasca era Perang Dingin, dimana fokus utama dalam keamanan nasional adalah negara. Hal tersebut merupakan hasil perspektif realisme dalam hubungan internasional yang memandang situasi dunia dalam keadaan anarki dan senantiasa dalam suasana persaingan antar negara demi alasan keamanan, ekonomi, pengaruh dan faktor lainnya<sup>22</sup>. Selain itu, dalam konteks tersebut, istilah keamanan selalu dihubungkan dengan potensi ancaman maupun penggunaan kekuatan militer<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup>Rogers, *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess, (Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hlm. 11.

<sup>19</sup>Dahlan, *Pemerataan Informasi, Komunikasi Dan Pembangunan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 1997), hlm. 2.

<sup>20</sup>Keith Hayward, "The Globalization of Defence Industries", *Survival* Vol. 42, No.1, 2002, hlm. 1.

<sup>21</sup>Amarulla Octavian, "Revolusi Industri 4.0 Paksa Militer Beradaptasi Ke Artificial

*Intelligence*", 13 Mei 2019, dalam <http://samudranesia.id/revolusi-industri-4-0-paksa-militer-beradaptasi-ke-artificial-intelligence/>, diakses tanggal 30 November 2020.

<sup>22</sup>John Bayliss & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 25.

<sup>23</sup>Barry Buzan, *People State and Fear: The National Security Problem in the Third World*, (New York: Harvester Wheatsheaf., 1991), hlm. 10.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat terlihat bahwa telah terjadi perubahan konteks terhadap strategi pertahanan dan keamanan nasional dari yang sebelumnya didominasi oleh motivasi dari sebuah negara dalam memperkuat pertahanan guna mengimbangi ataupun mengancam negara lain, menjadi motivasi yang bersifat pragmatis dan cenderung membentuk hubungan baik antar negara maupun aktor non negara.

### **Perkembangan Lingkungan Strategis**

Indonesia yang memiliki ribuan pulau adalah negara maritim yang sekaligus juga merupakan negara kepulauan. Indonesia disebut negara maritim karena lautnya yang luas dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki 13.466 ribu lebih gugusan pulau-pulau di wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi, dengan garis pantai mencapai 95.181 km sebagai salah satu garis pantai terpanjang di dunia<sup>24</sup>. Kondisi yang sedemikian rupa telah membuat Indonesia sebagai sebuah negara yang penting baik secara geografis, demografis, maupun

geopolitik. Selain itu, posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan diapit dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia, juga membuat Indonesia menjadi negara yang strategis di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, Asia Timur, serta Asia Pasifik, dimana hal ini menjadi sangat penting secara geostrategis. Dalam dua dekade terakhir, situasi di kawasan Asia Pasifik telah menunjukkan perkembangan yang jauh lebih dinamis dibandingkan kawasan-kawasan lain di dunia, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan. Perkembangan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung ketika kawasan lainnya mengalami resesi ekonomi berkepanjangan. Hal ini menyebabkan sektor perkembangan perekonomian dunia mengalami pergeseran bergeser dari negara-negara di kawasan Eropa ke negara-negara di kawasan Asia, atau dari kawasan Atlantik ke Asia Pasifik, dengan tingkat aktifitas perdagangan dunia di kawasan ini yang diprediksi mencapai 70 persen. Selain itu, dari segi distribusi, 75 persen komoditi yang diperdagangkan dikirim melalui laut dengan menggunakan

---

<sup>24</sup>Rokhmin Dahuri, "Roadmap Pembangunan Kelautan Untuk Mengembangkan Daya Saing Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur

dan Berdaulat", dalam Tim Ahli Seknas Jokowi, Jalan Kemandirian Bangsa. (Jakarta: Gramedia., 2014), hlm. 112.

wilayah perairan Indonesia, terutama melalui selat-selat seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sunda, serta Laut Arafuru, dan laut-laut Indonesia lainnya, dimana nilai perdagangan tersebut secara keseluruhan diperkirakan mencapai US\$ 1.500 trilyun setiap tahunnya<sup>25</sup>. Tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya hubungan internasional antar negara, baik negara yang berasal dari dalam kawasan, maupun negara di luar kawasan Asia Tenggara yang memiliki kepentingan secara simultan, membuat kedudukan Indonesia menjadi semakin penting. Di lain pihak, dinamika ekonomi dan politik yang terjadi di dalam kawasan ini turut memberikan kontribusi potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan Indonesia, yang telah muncul sebagai sebuah negara dengan pengaruh besar secara regional, yang dapat diharapkan dapat menjadi sebuah negara dengan kekuatan menengah pada abad 21<sup>26</sup>.

Wilayah perairan Indonesia yang mempunyai peran penting dikarenakan posisi geopolitik dan geostrategisnya ini merupakan salah satu kawasan yang akan

terkena dampak signifikan jika terjadi instabilitas sebagai akibat dari munculnya gangguan keamanan. Selat Malaka dan perairan sekitarnya sebagai salah satu contohnya, dimana 15,2 juta barel minyak per hari diperkirakan melewati perairan ini, jumlah tersebut merupakan yang terbanyak kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi Selat Malaka dan perairan sekitarnya memegang peranan penting dalam kelancaran distribusi logistik bahan bakar ke banyak negara di seluruh penjuru dunia. Berkaitan dengan posisi Indonesia dalam hal geopolitik dan geostrategis, visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia (PMD) memang tidak terlepas dari gagasan pemerintahan baru sejak kemenangan presiden Joko Widodo pada pemilu tahun 2014 lalu dimana sejak awal presiden meluncurkan agenda poros maritim dalam kampanye pilpresnya. Setelah memenangi pilpres dan mulai resmi menjabat sebagai presiden RI, kampanye ini dilanjutkan dengan memasukkan program poros maritim dalam sembilan agenda pembangunan nasional pemerintahannya atau

---

<sup>25</sup>Tulus Warsito, "Geostrategi Maritim Indonesia Dalam Perspektif Diplomasi" dalam Tim Ahli Seknas Jokowi, *Jalan Kemandirian Bangsa*. (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm 154.

<sup>26</sup>Gregory B. Polling, "Dynamics Equilibrium: Indonesia's Blue Print for a 21st Century Asia Pacific", Washington DC: CSIS, 2013.

Nawacita. Dalam implementasinya, beberapa rancangan undang-undang juga dibuat untuk memberikan dasar hukum bagi program tersebut, seperti rancangan undang-undang mengenai perlindungan nelayan dan budidaya ikan, pembangunan infrastruktur dan transportasi antar wilayah, serta rancangan undang-undang lain yang mendukung. Konsep mengenai poros maritim sebenarnya bukanlah konsep baru, jika dilihat bahwa negara-negara dengan angkatan laut yang kuat seperti Inggris, Portugis dan Spanyol telah menjadi penguasa laut ketika mereka menguasai banyak wilayah di dunia pada masa lalu. Namun munculnya Amerika Serikat bersama sekutunya sebagai kekuatan dominan di dunia pasca Perang Dingin dan keruntuhan Uni Soviet, serta bangkitnya Cina sebagai kekuatan baru di kawasan Asia, terlebih pada saat ini, telah menjadi sebuah pengingat tentang pentingnya peran kekuatan maritim secara regional, dimana kekuatan-kekuatan baru tersebut mengandalkan sektor maritim sebagai agenda kerja jangka panjang di masa mendatang. Dilihat dari konsep poros maritim dunia,

pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sektor kemaritiman, komitmen dari pemerintah untuk menempatkan lautan sebagai masa depan bangsa maritim ini dibuktikan dengan dibentuknya kementerian baru dalam kabinet kerja presiden Joko Widodo, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman<sup>27</sup>. Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga telah meluncurkan gagasan pembangunan transportasi perairan yang disebut 'tol laut' sebagai solusi untuk memperbaiki keterhubungan dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam negeri, sehingga diharapkan bahwa laut bukan lagi dikatakan sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bagi ribuan pulau yang berada wilayah Indonesia. Keterhubungan tersebut diharapkan dapat menjadi kunci untuk menyelamatkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dari keterpisahan, dimana jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya yang cukup berjauhan, sehingga kondisi infrastruktur yang ada harus ditingkatkan untuk merespon keinginan dalam menjadikan Indonesia sebagai poros

---

<sup>27</sup>Diaz Hendropriyono, "Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia", 22 April 2019, dalam <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi>

negara-poros-maritim-dunia/, diakses tanggal 30 November 2020.

maritim dunia sebagai konsekuensinya. Dalam implementasi poros maritim dunia, faktor konektivitas merupakan hal yang penting berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Sehubungan dengan statusnya sebagai negara maritim, Indonesia memiliki alur di dalam wilayah kedaulatannya yang disebut sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Alur tersebut adalah alur laut yang dapat dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya<sup>28</sup>, dengan kata lain ALKI merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan internasional yang dapat dipergunakan secara damai oleh kapal atau pesawat asing untuk melintas di perairan yang merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Semua kapal

maupun pesawat yang bertujuan melewati wilayah perairan Indonesia secara rutin dapat memanfaatkan ALKI dari suatu bagian ZEE Indonesia atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya<sup>29</sup>, sehingga pemanfaatan ALKI harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia, hal ini sesuai dengan aturan internasional yang berlaku di perairan negara kepulauan manapun di dunia dalam hal perlintasan. Bagi negara-negara di seluruh dunia sebagai pengguna jalur pelayaran, pada dasarnya mereka dapat memilih jalur yang dianggap paling menguntungkan baik dari segi keamanan maupun ekonomi dengan berpedoman pada ketentuan dalam *United Nation Convention of The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982. Di sisi lain, negara kepulauan yang dilalui seperti Indonesia, harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan alur laut tersebut di samping memanfaatkan peluang ekonomi dan meminimalkan kendala dari pilihan jalur tersebut<sup>30</sup>.

### **Ancaman Maritim Indonesia**

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

<sup>29</sup> Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Prospek Dan Kendala*. (Jakarta: Seskoal., 2012), hlm. 185.

<sup>30</sup> Hasjim Djalal, *Indonesia and The Law of The Sea*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, ancaman dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata<sup>31</sup>. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang telah dan sedang terjadi, yang meliputi terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sedangkan ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara, saat ini dan ke depan kemungkinannya masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Dalam kajian Kementerian Pertahanan diungkapkan bahwa terorisme internasional, pencurian kekayaan alam, dan konflik batas wilayah perbatasan merupakan tiga ancaman nyata yang berpotensi besar terjadi di atau lewat laut dan jenis ancaman ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi Indonesia di masa kini maupun di masa

mendatang. Khusus untuk terorisme, ancaman tersebut merupakan salah satu contoh ancaman yang bersifat global, karena selain mengancam stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia, kejahatan terorisme tentu juga akan berdampak pada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, dimana Indonesia memiliki posisi penting secara geopolitik dan geostrategis. Terorisme merupakan ancaman telah ada sejak awal perang, hal tersebut didefinisikan sebagai penggunaan yang dihitung dari kekerasan yang melanggar hukum atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum untuk menanamkan rasa takut dan dimaksudkan untuk memaksa atau untuk mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya bersifat politik, agama, atau ideologis<sup>32</sup>. Kategori ancaman tersebut mencakup ancaman yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Ancaman tradisional bersumber dari kehadiran pihak militer negara asing dengan adanya alat utama sistem persenjataan mereka. Sedangkan ancaman tradisional dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang berasal dari aktor

---

<sup>31</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2015), hlm. 22-23.

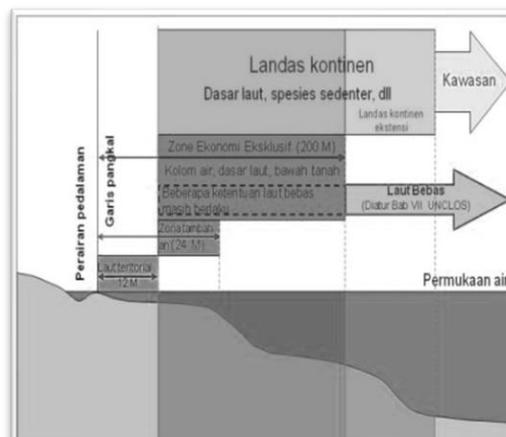
<sup>32</sup>Sam J. Tangredi, *Globalization and Maritime Power*, (Washington DC: NDU Press Publication., 2002), hlm. 100.

negara (*state actor*) maupun aktor non-negara (*non-state actor*), baik secara individual maupun kelompok. Adanya alur laut kepulauan Indonesia yang dapat dilalui oleh pelayaran internasional juga secara formal telah menjadikan perairan Indonesia bersifat sangat terbuka terhadap masuknya potensi terjadinya kejahatan lintas negara. Terkait hal tersebut, luasnya wilayah dan sebaran pulau-pulau di Indonesia, membuat pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia menjadi sangat sulit jika dihadapkan dengan kemampuan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan instansi maritim lain sebagai komponen pendukung dalam menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, mekanisme penanganan kejahatan lintas negara memerlukan regulasi khusus berupa peraturan pemerintah sebagai acuan bagi instansi yang berwenang dalam menjalankan tindakan yang dapat dilakukan langsung oleh perangkat daerah<sup>33</sup>

### Masalah Batas Wilayah Maritim

<sup>33</sup>Suhirwan & L. Y. Prakoso, "Defense Strategy at Sea Handling of Transnational Organized Crime (TNO) in Nunukan Indonesia's National Sea

Sebagai negara yang memiliki pantai, Indonesia memiliki batas-batas maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, oleh karena itu penetapan batas maritim Indonesia merupakan implementasi dari konvensi tersebut. Dalam UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa terdapat beberapa wilayah perairan yang dimiliki oleh setiap negara pantai, yaitu meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas. Sebagai negara yang mengakui konvensi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan UNCLOS 1982 kedalam hukum nasionalnya, termasuk didalamnya mengenai negara kepulauan, pengaturan perbatasan dengan negara tetangga, dan batas wilayah yurisdiksi dengan laut bebas.



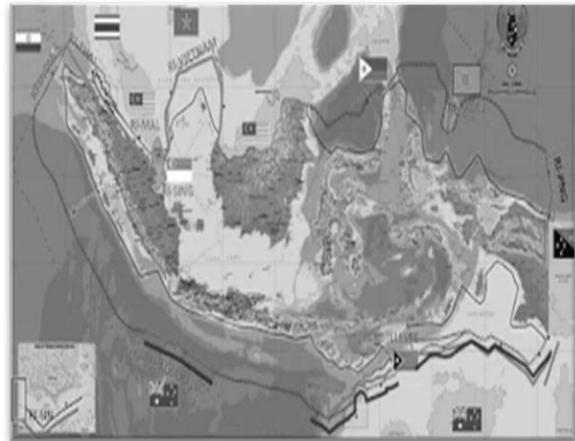
**Gambar 1.** Ilustrasi Zona Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982

Sumber: I Made Andi Arsana, 2014

*Border", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, hlm 6.*

Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE, dan batas landas kontinen. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, dimana sebuah negara pantai memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari

wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen<sup>34</sup>.



**Gambar 2.** Batas Wilayah Indonesia  
Sumber: Kemlu RI

Sehubungan dengan permasalahan batas wilayah Indonesia dengan negara lain, banyak sengketa wilayah perbatasan yang belum selesai dan masih dalam proses perundingan hingga saat ini. Sejauh ini permasalahan yang sering terjadi dalam wilayah perairan Indonesia diluar kejahatan lintas negara adalah pelanggaran batas wilayah oleh kapal penangkap ikan maupun kapal perang negara lain seperti Malaysia, Vietnam dan Cina, khususnya di perairan Natuna dan sekitarnya<sup>35</sup>.

### Konflik Laut Cina Selatan

<sup>34</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Section 2*, hlm. 23-26.

<sup>35</sup> Haryanti Puspa Sari, "Banyak Kapal Asing Langgar Batas Wilayah, TNI Siaga Tempur Di Natuna", 3 Januari 2020, dalam

[https://nasional.kompas.com/read/banyak\\_kapal\\_asing\\_langgar\\_batas\\_wilayah\\_tni\\_siaga\\_tempur\\_di\\_natuna](https://nasional.kompas.com/read/banyak_kapal_asing_langgar_batas_wilayah_tni_siaga_tempur_di_natuna), diakses tanggal 30 November 2020.

Saat ini, situasi di Laut Cina Selatan (LCS) masih menjadi salah satu fokus perhatian dunia. Terbukanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan LCS dengan sendirinya mendorong negara-negara yang pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya sebagaimana ditentukan oleh hukum laut internasional. Pada Januari 1992, Cina mengumumkan *Law of the People's Republic of China on the Territorial Waters and Contiguous Areas* atau Hukum Republik Rakyat Cina tentang Teritorial Perairan dan Area Yang Berdekatan dan mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian tak terbantahkan dari wilayahnya<sup>36</sup>. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya dengan pelaksanaan kegiatan militer dan ekonomi sepihak di wilayah sengketa oleh Cina. Hal tersebut membuat situasi di Laut Cina Selatan memanas, khususnya dengan negara pengklaim di Asia

Tenggara yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tercatat beberapa kali terjadi konflik, mulai dari penempatan pasukan hingga konflik bersenjata. Cina, Vietnam, Filipina, dan Malaysia yang berlomba-lomba mengklaim, sampai mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka klaim, bahkan memberi konsensi pada perusahaan-perusahaan minyak asing, khususnya Amerika dan Inggris, untuk melakukan eksplorasi minyak di kawasan yang mereka klaim masing-masing. Persaingan dalam proses pernyataan hak ini berkembang menjadi konflik militer khususnya oleh Cina dan Vietnam pada tahun 1974 dan 1988. Cina secara terbuka mendirikan bangunan yang disertai dengan sistem komunikasi canggih, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Cina membangun pangkalan dan landasan pesawat yang dituding dibuat khusus untuk tujuan militer<sup>37</sup>. Perkembangan ini menunjukkan dengan jelas besarnya kepentingan Cina di Kepulauan Spratly. Secara geografis kawasan LCS di kelilingi sepuluh negara

---

<sup>36</sup>Nuswantoro Dwi Warno & Soekotjo Hardiwinoto, "Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017, hlm. 4.

<sup>37</sup>Julkifli Sinuhaji, "Tiongkok Sedang Persiapkan Perang Dunia 3? Fasilitas Militer Dibangun Di

Sekitar Laut China Selatan", 11 Oktober 2020, dalam [https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/tiongkok\\_sedang\\_persiapkan\\_perang\\_dunia\\_3?fasilitas\\_militer\\_dibangun\\_di\\_sekitar\\_laut\\_china\\_selatan/](https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/tiongkok_sedang_persiapkan_perang_dunia_3?fasilitas_militer_dibangun_di_sekitar_laut_china_selatan/), diakses tanggal 30 November 2020.

pantai yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina, serta dua negara tak berpantai yaitu Laos, dan Makau yang merupakan *dependent territory*. Kawasan LCS bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, serta jalur lintas laut perdagangan internasional, yang mana menjadikan kawasan tersebut mengandung potensi kerjasama sekaligus potensi konflik. Akhir-akhir ini Amerika Serikat (AS) turut menghadirkan armada lautnya di LCS, AS telah berulang kali menyatakan kehadirannya di kawasan adalah guna menjaga perdamaian dan kebebasan perairan yang menjadi jalur perdagangan penting dunia itu<sup>38</sup>. Di sisi lain, Cina telah terus memperluas klaimnya atas berbagai wilayah di perairan itu. Klaim ini telah dianggap ilegal oleh AS dan menjadi salah satu alasannya mengintensifkan patroli di

perairan LCS. Kehadiran armada AL AS sebagai penghadang dominasi kekuatan laut Cina juga semakin membuat situasi semakin memanas di kawasan Asia. Akibatnya, timbul kekhawatiran dari kapal-kapal asal negara pengguna jalur transportasi logistik terhadap kemungkinan implikasi dan prospek konflik LCS atas kawasan perairan di sekitarnya. Dilihat dari sisi Indonesia, kekhawatiran dampak eskalasi ketegangan di LCS muncul terutama terhadap ALKI I yang melewati rute Selat Malaka dan berbatasan dengan perairan Natuna Utara dan ZEE Indonesia di Kabupaten Kepulauan Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau.

### **Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin TNI AL**

Dalam menjalankan lima tugas utamanya seperti tercantum pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berpegang pada doktrin sebagai landasan strategi dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut dilakukan guna menanggulangi ancaman aspek laut serta gangguan keamanan baik

---

<sup>38</sup>Rehia Sebayang, "Bukan China, AS Pemicu Ketegangan Di Laut China Selatan", 28 Juli 2020, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/>

[bukan\\_china\\_as\\_pemicu\\_ketegangan\\_di\\_laut\\_china\\_selatan/](#), diakses tanggal 30 November 2020.

dalam maupun luar negeri agar tercipta kondisi laut yurisdiksi nasional yang aman dan terkendali. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, TNI AL mempunyai empat peran utama yang meliputi peran militer (*military role*), peran penegakan hukum di laut (*law enforcement role*), peran diplomasi (*diplomacy role*) dan peran dukungan (*benign role*)<sup>39</sup>. Peran militer merupakan penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata di laut dalam rangka menegakkan kedaulatan dan pertahanan negara, dengan cara penangkalan, penindakan dan pemulihan. Sehubungan dengan perkembangan situasi konflik di LCS, TNI AL telah menjalankan peran militer dengan menghadirkan unsur-unsur KRI secara kontinyu di perairan Natuna guna menegaskan kedaulatan negara di laut terhadap kapal perang asing, khususnya dari Cina. Peran penegakan hukum di laut dilaksanakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional di laut, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum di laut, termasuk

pengecahan maupun penindakan terhadap tindakan illegal di laut seperti *illegal fishing* dan kejahatan terorganisir lintas negara. Peran diplomasi merupakan peran global setiap angkatan laut di seluruh dunia, peran ini juga dikenal sebagai sarana *show of force* yang menjadi peran tradisional angkatan laut, yaitu penggunaan kekuatan dalam mendukung kebijakan luar negeri dan dirancang untuk mempengaruhi situasi suatu negara pada masa damai maupun perang. Masih terkait dengan konflik Laut Cina Selatan, baru-baru ini TNI AL, dalam hal ini Komando Armada I telah mengerahkan sembilan kapal perang dan satu pesawat udara dalam latihan Operasi Dukungan Tembakan Tahun 2020 di Laut Natuna Selatan, Kepulauan Riau<sup>40</sup>. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kehadiran negara di laut yang merupakan wilayah kedaulatan sekaligus unjuk kebolehan alutsista dalam memberikan efek *deterrent* di wilayah perairan Indonesia. Peran dukungan merupakan peran TNI AL yang ditujukan untuk membantu tugas-tugas pemerintah atau tugas

---

<sup>39</sup>Keputusan Kasal Nomor Kep/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe, 2018, hlm. 23-24.

<sup>40</sup>Achmad Nasrudin Yahya, "Latihan Di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal

Perang dan 1 Pesawat", 25 November 2020, dalam [https://nasional.kompas.com/read/latihan\\_di\\_laut\\_natuna\\_selatan\\_tni\\_al\\_kerahkan\\_9\\_kapal\\_perang\\_dan\\_1\\_pesawat](https://nasional.kompas.com/read/latihan_di_laut_natuna_selatan_tni_al_kerahkan_9_kapal_perang_dan_1_pesawat), diakses tanggal 30 November 2020.

kemanusiaan selain ketiga peran diatas. Selain peran-peran tersebut, TNI AL juga memiliki tiga fungsi pertahanan negara. Fungsi pertama adalah sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman di, dari, maupun lewat laut yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi penangkalan dilakukan dengan mengkomunikasikan kekuatan, kapasitas, kapabilitas, serta komitmen TNI AL yang memiliki dampak psikologis sehingga musuh mengurungkan niatnya. Fungsi kedua adalah sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman di, dari, maupun lewat laut yang merupakan tindakan untuk melemahkan, menghancurkan maupun melumpuhkan pusat kekuatan musuh dengan memperhatikan kelemahan musuh. Fungsi ketiga adalah sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dimana TNI AL bersama unsur TNI lain dan pemerintah bekerja untuk mengembalikan kondisi negara yang terganggu akibat kekacauan karena perang, konflik sosial, pemberontakan, bencana alam, dan lain-lain.

Dalam doktrin Jalesveva Jayamahe, dinyatakan bahwa TNI AL memiliki karakter yang khusus, dimana medan operasinya mampu menghubungkan

wilayah yang multidimensi, yaitu ruang udara, permukaan laut dan kolom air dibawahnya. Selain itu, TNI AL memiliki empat karakter militer yaitu kekuatan yang selalu siap siaga, kekuatan yang fleksibel, kekuatan yang mandiri, dan kekuatan dengan mobilitas tinggi. Sebagai elemen pertahanan di laut, TNI AL memiliki struktur kekuatan yang disebut Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Sistem ini terdiri dari kapal perang (KRI), pesawat udara, pasukan Marinir, dan pangkalan yang masing-masing memiliki kemampuan yang spesifik dan saling mendukung untuk menjadi kekuatan yang terintegrasi. Dalam membina kekuatannya, TNI AL membagi struktur ini menjadi empat yaitu kekuatan pemukul (*striking force*) yang tersusun atas KRI dan pesawat yang memiliki senjata strategis, kekuatan patroli (*patrolling force*) yang tersusun atas KRI dan pesawat dengan tugas kekamlaan, kekuatan pendukung (*supporting force*) yang tersusun atas KRI dan pangkalan untuk mendukung tugas utama TNI AL, dan kekuatan proyeksi (*projection force*) yang tersusun atas elemen-elemen laut dan pasukan pendarat (Marinir) untuk melaksanakan proyeksi kekuatan dari laut ke darat.

Dalam pelaksanaan kampanye militer di laut, tingkat keberhasilan sangat bergantung pada integrasi antara kekuatan darat, laut dan udara untuk memastikan penggunaan alutsista yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat, dimana operasi akan berjalan dengan efektif jika keunggulan udara telah dikuasai. Pada dasarnya, kekuatan maritim memiliki beberapa atribut operasional yang bersifat khusus. Yang pertama adalah akses, dimana kekuatan maritim memanfaatkan laut sebagai media untuk mengerahkan kekuatan secara signifikan. Yang kedua adalah mobilitas, dimana tingkat pergerakan yang tinggi akan mempermudah dalam menghadapi perubahan situasi di lapangan. Yang ketiga adalah kapasitas angkut, dimana angkutan laut merupakan satu-satunya cara untuk mendistribusikan peralatan dan dukungan logistik, untuk kemudian mempertahankan pada skala apapun sesuai dimensi ruang peralatan yang terlibat. Yang keempat adalah berkelanjutan, yaitu kemampuan untuk beroperasi secara independen tanpa dukungan eksternal dalam waktu relatif lama. Yang kelima adalah keserbagunaan, yaitu kemampuan untuk mengubah postur militer, melakukan beberapa tugas secara

simultan, dan melakukan perubahan tugas dengan cepat melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki. Yang keenam adalah kesiapan, dimana kekuatan laut dapat berada di daerah operasi baik secara sembunyi maupun terbuka dan cepat beradaptasi sesuai dengan tempo operasi. Yang ketujuh adalah ketahanan, yaitu sistem kompartemensi yang memiliki kemampuan untuk menahan serangan dan kerusakan yang signifikan sebelum menjadi tidak berfungsi. Yang terakhir adalah daya pengaruh, dimana seluruh atribut operasional tersebut mampu memberikan daya pengaruh terhadap kejadian tertentu di darat. Berkaitan dengan fungsi TNI AL dalam membina kekuatan, pembinaan bertujuan untuk mewujudkan postur dan kesiapan operasional unsur-unsur TNI AL agar mampu melaksanakan tugas negara, baik OMP maupun OMSP. Pembinaan tersebut meliputi perencanaan program strategis, evaluasi kemampuan TNI AL, pengadaan infrastruktur, serta penyiapan, pengorganisasian, dan pelatihan terhadap prajurit dan alutsista, dimana output dari seluruh sistem pembinaan tersebut adalah kesiapan operasional TNI AL. Dalam pembinaan kekuatan TNI AL, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian,

yaitu sumber daya manusia (SDM), *software*, alutsista, sistem logistik, infrastruktur, komponen cadangan dan komponen pendukung, serta kemampuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

### **Tantangan Ke Depan**

Dalam era globalisasi saat ini, bentuk dan jenis tantangan yang dihadapi kian beragam, termasuk tantangan dalam bidang militer dan strategi pertahanan. Untuk menghadapi tantangan ke depan, pembinaan SDM di era globalisasi ini menghadirkan tantangan tersendiri, dimana pola hidup hedonis dan keinginan memperoleh sesuatu secara instan dapat mempengaruhi moralitas prajurit matra laut yang pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap menurunnya profesionalisme. Dalam doktrin Jalesveva Jayamahe, kepemimpinan yang kuat dituntut untuk menghadapi tantangan sebagai pengaruh dari globalisasi. Pembinaan TNI AL harus bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki kualitas moral dan profesionalisme melalui berbagai bidang penugasan untuk membentuk karakter prajurit pejuang matra laut yang tangguh dan memiliki integritas tinggi. Dalam hal kemandirian, sebagai unsur kekuatan yang sangat

mengandalkan teknologi, TNI AL masih menggunakan teknologi tinggi seperti sensor dan senjata dari negara lain. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan terhadap negara lain, disamping itu juga dapat membuat posisi tawar Indonesia menjadi lemah di mata negara produsen. Oleh karena itu industri pertahanan dalam negeri kedepan diharapkan mampu memproduksi kebutuhan yang diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi pertahanan melalui berbagai program yang melibatkan *transfer of technology* dan *transfer of knowledge*. Perubahan bentuk ancaman dengan munculnya aktor-aktor non negara juga melahirkan tantangan baru, dimana *assymetric warfare*, *proxy war*, maupun *cyber war* telah menjadi bagian dari perang generasi kelima sebagai akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sehingga diperlukan cara berpikir non tradisional guna menghadapi munculnya jenis ancaman tersebut. Dalam hal tindak kejahatan di laut, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari sebaran pulau-pulau merupakan tempat yang ideal bagi para pelaku kejahatan, baik nasional maupun *transnational* sehingga diperlukan perencanaan dan gelar operasi yang baik guna mencapai tujuan secara efektif dan

efisien. Salah satu trend produk pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah platform nirawak yang berbentuk *drone*, baik *Autonomous Underwater Vehicle (AUV)* maupun *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, dimana keberadaan teknologi persenjataan semacam ini dapat merubah perimbangan kekuatan secara signifikan dalam pertempuran. Tantangan terakhir menurut doktrin Jalesveva Jayamahe adalah konsep *Network Centric Warfare (NCW)* yang merupakan terobosan dalam konsep peperangan modern, dimana konsep tersebut mempertajam fungsi *Command and Control (C2)* menjadi *Command, Control, Communication, Computer, Information, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)*. Jika disederhanakan, NCW merupakan konsep dimana semua perangkat terhubung dengan internet sehingga semua informasi kritis terkait pertempuran dapat diperoleh dengan segera. Konsep tersebut menuntut cara berpikir baru yang koheren pada semua level operasi militer, mulai dari level taktis sampai strategis dimana teknologi menjadi intinya.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Di era globalisasi dan keterbukaan informasi ini, solusi masalah di bidang pertahanan tidak lagi hanya bisa dilakukan dengan cara konvensional, melainkan juga dengan penguasaan pengetahuan. Pada masa ini, peperangan semakin terdiversifikasi ke dalam banyak aspek, tidak hanya militer melainkan aspek lain seperti ekonomi dan juga teknologi informasi. Oleh karenanya, elemen kepentingan nasional tidak lagi diupayakan dengan hanya mengandalkan kekuatan nasional, melainkan melalui berbagai kolaborasi. Dalam hal ini, pengadaan alat persenjataan perlu semakin banyak dilakukan secara bersama-sama dalam rangka alih teknologi. Dimensi ancaman juga mengalami perubahan dari yang hanya bersifat tradisional, menjadi non-tradisional, dan pada saat ini semakin mengerucut pada tatanan ancaman yang bersifat lintas negara. Dimensi baru ancaman ini menambah rawannya *spill-over* dari satu negara ke negara lain, dimana ancaman semakin rentan terjadi melewati batas-batas negara satu dengan yang lain. Doktrin TNI AL Jalesveva Jayamahe yang merupakan acuan dalam penyusunan strategi pertahanan di laut telah mencakup semua aspek bidang

pertahanan laut termasuk tantangan, dan sasaran ke depan dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Implementasi yang baik dari konsep doktrin tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan dalam penguatan strategi pertahanan laut secara optimal.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Caverley, Jonathan D. (2007). *United States Hegemony and the New Economics of Defense*. *Journal of Security Studies*, Vol. 16.
- Hayward, Keith (2002). *The Globalization of Defence Industries*. *Survival*, Vol. 42.
- Lykke, Arthur F. (1997). *Defining Military Strategy*. *Military Review*, January/February.
- Warno, Nuswantoro Dwi & Soekotjo Hardiwinoto. (2017). Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6.
- Polling, Gregory B. (2013). *Dynamics Equilibrium: Indonesia's Blue Print for a 21st Century Asia Pacific*. Washington DC: CSIS.
- Rosenberg, Justin (2005). *Globalization Theory: A Post Mortem*. *International Politics*, Vol. 42.
- Suhirwan & L. Y. Prakoso (2019). *Defense Strategy at Sea Handling of Transnational Organized Crime (TNO) in Nunukan Indonesia's National Sea Border*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.

### Buku

- Bayliss, John, and Steve Smith (2006). *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Benoit, Emile (1978). *Economic Development and Cultural Change*. Lexington: Lexington Books.
- Bitzinger, Richard A. (2009). *The Modern Defence Industry: Political, Economic, and Technological Issues*. California: ABC CLIO.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015). Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Buntoro, Kresno (2012). *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Prospek Dan Kendala*. Jakarta: Seskoal.
- Buzan, Barry (1991). *People State and Fear: The National Security Problem in the Third World*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Creswell, John W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan (1997). *Pemerataan Informasi, Komunikasi Dan Pembangunan*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia
- Dahuri, Rokhmin (2014). *Roadmap Pembangunan Kelautan Untuk Mengembangkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*. dalam Tim Ahli Seknas Jokowi, Jalan Kemandirian Bangsa. Jakarta: Gramedia.
- Djalal, Hasjim (1995). *Indonesia and The Law of The Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Kaldor, Mary, and Ulrich Albrecht (1998) *The End of Military Fordism: Restructuring the Global Military Sector*. London: United Nations University.
- Ritzer, George (2010). *The Globalization of Nothing, Mengkonsumsi Kehampaan Di Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Atmajaya.

Rogers (1991). *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan Oleh Zulkarnaina Mohd. Mess. Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sloan, Eleanor (2008). *Military Transformation and Modern Warfare: A Reference Handbook*. Westport: Praeger Security International.

Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangredi, Sam J. (2002). *Globalization and Maritime Power*. Washington DC: NDU Press Publication.

Tzu, Sun, Carl Von Clausewitz, Niccolò Machiavelli, and Baron De Jomini (2012). *The Complete Art of War*. USA: Start Publishing LLC.

Warsito, Tulus (2014). *Geostrategi Maritim Indonesia Dalam Perspektif Diplomasi, dalam Jalan Kemandirian Bangsa*. Jakarta: Gramedia.

## Website

Hendropriyono, Diaz, "Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia", 22 April 2019 dalam <https://setkab.go.id/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>, diakses tanggal 30 November 2020.

Mabesal, "Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe", 18 September 2018, dalam <https://www.tnial.mil.id/doktrin/JalesvevaJayamahe/2018>, diakses tanggal 30 November 2020.

Octavian, Amarulla, "Revolusi Industri 4.0 Paksa Militer Beradaptasi Ke Artificial Intelligence", 13 Mei 2019, dalam <http://samudranesia.id/Revolusi-Industri-4-0-Paksa-Militer-Beradaptasi-Ke-Artificial-Intelligence/>, diakses tanggal 30 November 2020.

Sari, Haryanti Puspa, "Banyak Kapal Asing Langgar Batas Wilayah, TNI Siaga Tempur Di Natuna", 3 Januari 2020 dalam

[https://nasional.kompas.com/read/2020/banyak\\_kapal\\_asing\\_langgar\\_batas\\_wilayah\\_tni\\_siaga\\_tempur\\_di\\_natuna/](https://nasional.kompas.com/read/2020/banyak_kapal_asing_langgar_batas_wilayah_tni_siaga_tempur_di_natuna/), diakses tanggal 30 November 2020.

Sebayang, Rehia, "Bukan China, AS Pemicu Ketegangan Di Laut China Selatan", 28 Juli 2020, dalam [https://www.cnbcindonesia.com/news/bukan\\_china\\_as\\_pemicu\\_ketegangan\\_di\\_laut\\_china\\_selatan/](https://www.cnbcindonesia.com/news/bukan_china_as_pemicu_ketegangan_di_laut_china_selatan/), diakses tanggal 30 November 2020.

Sinuhaji, Julkifli, "Tiongkok Sedang Persiapkan Perang Dunia 3? Fasilitas Militer Dibangun Di Sekitar Laut China Selatan", 11 Oktober 2020, dalam [https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/tiongkok\\_sedang\\_persiapkan\\_perang\\_dunia\\_3?](https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/tiongkok_sedang_persiapkan_perang_dunia_3?), diakses tanggal 30 November 2020.

Yahya, Achmad Nasrudin, "Latihan Di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang Dan 1 Pesawat", 25 November 2020, dalam [https://nasional.kompas.com/read/latihan\\_di\\_laut\\_natuna\\_selatan\\_tni\\_al\\_kerahkan\\_9\\_kapal\\_perang\\_dan\\_1\\_pesawat](https://nasional.kompas.com/read/latihan_di_laut_natuna_selatan_tni_al_kerahkan_9_kapal_perang_dan_1_pesawat), diakses tanggal 30 November 2020.

## Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan Kasal Nomor Kep/1111/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe, 2018.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Doktrin Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.*